



Dampak Manajemen Anggaran terhadap Penyerapan: Wawasan dari Jawa Timur

Ratna Novy Hari Andriani, Sarwenda Biduri*

Univeristas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: Penelitian ini menginvestigasi pengaruh perencanaan anggaran, peraturan/regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan anggaran terhadap pengelolaan dan penyerapan anggaran daerah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Data dikumpulkan dari 68 responden yang bekerja di berbagai peran keuangan di 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 5 Bidang Pelaksana Jalan dan Jembatan dengan menggunakan formulir G. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data. Temuan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan anggaran secara signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran, sedangkan peraturan/regulasi tidak. Penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih jelas dan menekankan pentingnya perencanaan yang efektif dan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan penyerapan anggaran. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan jumlah sampel yang lebih besar untuk meningkatkan akurasi data dan mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Aturan /Regulasi, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Anggaran, Penyerapan Anggaran

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.269>

*Correspondence: Sarwenda Biduri

Email: sarwendabiduri@umsida.ac.id

Received: 17-05-2024

Accepted: 18-05-2024

Published: 25-05-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrack: This study investigates the influence of budget planning, rules/regulations, human resources, procurement of goods and services, and budget execution on regional budget management and absorption at the Public Works Department of Highways, East Java Province. Data were collected from 68 respondents working in various financial roles across 12 Technical Implementation Units (UPT) and 5 Roads and Bridges Implementing Fields using G-form. Multiple linear regression analysis was employed to analyze the data. The findings indicate that budget planning, human resources, procurement of goods and services, and budget execution significantly affect budget absorption, whereas rules/regulations do not. The study suggests the need for clearer regulations and emphasizes the importance of effective planning and human resource management in enhancing budget absorption. Future research should consider larger sample sizes to improve data accuracy and explore additional factors impacting budget absorption.

Keywords – Budget Planning, Rules / Regulations, Human Resources, Procurement of Goods and Services Budget, implementation, Budget Absorption

Pendahuluan

Upaya pemerintah dalam administrasi yang baik, strategi publik adalah perlu menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based administration) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah Jawa Timur yang di bentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2016, Tentang Struktur Organisasi, Nomenklatur, Uraian Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Jawa Timur, Merupakan Tanggung Jawab Dan Tugas Sebagai Penyedia Jasa dan pelayanan infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Prasarana jalan merupakan salah satu sarana transportasi memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional, regional dan lokal, pergerakan manusia, barang dan jasa. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dalam bentuk program tahunan yaitu pemeliharaan jalan berkala, pemeliharaan rutin, peningkatan struktur (kapasitas) dan pembangunan jalan baru (Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provisi Jawa Timur tahun 2017), dalam pelaksanaannya terbagi dalam 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jalan dan Jembatan (PJJ) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur, mantab terpelihara, sebagai unit kerja dalam menjalankan tugas – tugas dan tanggung jawab ditanggung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan tiap 1 (satu) tahun anggaran dimulai per 1 Januari sampai dengan 31 desember yang telah disusun dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Anggaran berfungsi sebagai mesin pemerintah, memberikan dasar untuk semua pengeluaran dan keputusan pendapatan. Menurut Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GASB), anggaran adalah rencana keuangan operasional yang mencakup biaya yang diantisipasi bastian dalam (Rahmadani & Setiawan, 2019). Dalam konteks pembahasan menurut Mardiasmo dalam (Masmarullah & Isiswati, 2020), Anggaran sektor publik berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang didanai publik. Agar perencanaan anggaran pada akhirnya tidak mengakibatkan gagalnya rencana yang telah disusun, maka penganggaran di sektor publik harus memperhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Ketika perencanaan strategis dan perumusan strategi selesai, proses penganggaran sektor publik dimulai. Rencana keuangan merupakan penjelasan tentang perincian dan menetapkan rencana strategi (Kuswoyo, 2011). Komponen perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas semuanya harus diperhitungkan dalam anggaran untuk sektor publik. Porsi penyerapan anggaran menjadi salah satu persoalan publik. Masalah penyerapan anggaran yang biasanya rendah di awal tahun dan tinggi di akhir tahun (Suwarni, 2017).

Penyerapan anggaran yang sistematis, mampu menciptakan tingkat pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi anggaran yang teragendakan sesuai dengan strategi kerja yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran, dalam hal penetapan rencana penyerapan anggaran yang mengacu pada [7] Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 Mengenai Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022, untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan secara garis besar pelaksanaan anggaran. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) selain gaji dan fungsional diatur sebagai berikut: $\pm 20\%$ pada Triwulan I, $\pm 35\%$ pada Triwulan II, $\pm 25\%$ pada Triwulan III dan $\pm 20\%$ pada Triwulan IV, pada pengakuan masing-masing Triwulan sebesar $\pm 5\%$ (lima persen).

Tabel 1. Realisasi Penyerapan Anggaran Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2019

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2018	1.016.558.563.000	890.057.527.141	87,56%

2019	911.077.231.000	753.413.446.680	82,69%
2020	492.716.429.990	392.956.370.518	79,75%
2021	1.521.525.320.816	1.460.472.225.137	95,99%

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Tingkat pencapaian penyerapan anggaran jalan dan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur periode 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat dari tabel 1 (satu), periode tahun 2018 tingkat penyerapan anggaran mencapai angka 87,56%, tahun 2019 mencapai angka 82,69%, tahun 2020 mencapai angka 79,75% dan tahun 2021 tingkat penyerapan anggaran mencapai 88,10% . Dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur memiliki daya serap APBD pada periode tahun 2018-2021 belum optimal, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER- 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menetapkan bahwa target penyerapan anggaran pada triwulan IV untuk Belanja barang/Jasa tidak kurang dari 90%. Berdasarkan pada kondisi yang telah dipaparkan pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021, fenomena keterlambatan demikian anggaran masih belum terserap secara optimal. Data ini menjelaskan bahwa daya serap anggaran belum mencapai target yang diinginkan, sehingga pemerintah perlu meningkatkan kinerja secara efisien dan efektif agar tercipta kesejahteraan masyarakat.

Masalah keterlambatan penyerapan anggaran ini memerlukan perhatian yang cukup besar dari pemerintah dan instansi terkait karena fenomena keterlambatan yang mengakibatkan sedikitnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sering terjadi setiap tahunnya. Ada berbagai alasan keterlambatan itu sendiri. Buruknya aspek perencanaan anggaran merupakan salah satu dari beberapa variabel yang telah disebutkan oleh banyak penelitian dan para ahli sebelumnya (Oancawati at all., 2016). Karena perencanaan anggaran mengendalikan dan menentukan arah tindakan organisasi yang ingin dicapai tujuannya, maka perencanaan anggaran yang lemah akan berdampak signifikan terhadap proses pencapaian penyerapan anggaran. Secara umum, karena berbagai tantangan administrasi dan teknologi, penyerapan anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa sangat lamban dalam pemenuhannya dan sering menumpuk menjelang akhir tahun.

Berlandaskan latar belakang diatas, penelitian ini mengembangkan penelitian dari (Putri at all., 2020). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan anggaran sebagai variable independen. Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan anggaran terhadap penyerapan anggaran khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Beberapa faktor telah diidentifikasi adalah kualitas sumber daya manusia, aturan/regulasi, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan anggaran Kemampuan pegawai pemerintah untuk melaksanakan semua kewajibannya merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyana, 2017) menjelaskan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia yang baik akan menyerap

anggaranannya dengan baik. Namun, menunjukkan bahwa dalam *teori stewardship*, Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki sertifikasi yang diperlukan, tidak pernah mengikuti pelatihan, dan bahkan memiliki beberapa penugasan seringkali berkontribusi pada kinerja proses penyerapan anggaran yang buruk.

Disisi lain, faktor dalam proses penyerapan anggaran, regulasi menjadi krusial. peraturan yang berkaitan dengan undang-undang yang dirancang khusus untuk diikuti sebagai rekomendasi ketika melakukan suatu kegiatan (Putri at all., 2020) menunjukkan bahwa pembatasan secara signifikan mempengaruhi bagaimana penyerapan anggaran. Selanjutnya, faktor perencanaan anggaran menurut menjelaskan. bahwa semakin siap penyusunan rencana keuangan, semakin besar kecepatan retensi rencana pengeluaran tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika perencanaan anggaran yang disusun tidak baik, maka laju asimilasi anggaran juga akan buruk. Pengadaan barang dan jasa menurut Proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran) dan pelaksanaan anggaran juga berperan penting dalam proses penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran akan dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran. Menurut teori keagenan, anggaran akan semakin efektif digunakan semakin baik diimplementasikan. Hal ini akan mempersulit Satuan Kerja Perangkat Daerah (*agent*) untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang memajukan baik tujuan organisasi maupun tujuan masyarakat (*principal*). Sejalan dengan penelitian dengan Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini secara khusus ingin melihat apakah kualitas SDM, regulasi, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap proses penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, pemerintah diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai pedoman dan bahan kajian dalam merumuskan kebijakan daerah.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Faktor Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Perencanaan anggaran daerah (APBD) terdiri dari dua komponen: (1) perumusan kebijakan anggaran (Formulasi Kebijakan Anggaran), yang meliputi pembuatan arah dan kebijakan umum APBD sebagai landasan perencanaan operasional, dan (2) kegiatan perencanaan operasional (Perencanaan Operasional Anggaran), yang melibatkan pembuatan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya.

Penelitian menurut Kerangka perencanaan anggaran memastikan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemantauan setiap Rencana Kerja sebagai landasan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Rencana untuk membuat setiap Sasaran Kinerja Pembangunan. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau ada kesalahan pemilihan rekening/kode rekening, perencanaan dapat diketahui dari dampaknya terhadap penyerapan anggaran melalui penyesuaian DPA. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran dan penyerapan anggaran. Dasar-dasar teoretis dan bukti empiris yang disebutkan di atas memungkinkan hipotesis berikut untuk diajukan:

H1: Perencanaan anggaran dan kegiatan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Faktor Aturan/Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran

Salah satu standar atau hukum yang harus diikuti adalah regulasi. Regulasi adalah konsep penggunaan hukum atau batasan untuk mengatur tingkah laku sosial atau manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan menurut mendefinisikan peraturan sebagai bentuk khusus dari kontrol yang menggunakan aturan atau standar yang dikombinasikan dengan pemantauan dan aktivitas penegakan aturan sebagai mekanisme kontrol. Berbagi pengetahuan terkait peraturan yang berlaku dapat menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan barang/jasa. Pegawai yang berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa harus memiliki pengetahuan, karena hal ini akan berdampak signifikan terhadap pencapaian penyerapan anggaran untuk pembelian tersebut. Menurut regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran sejalan dengan penelitian semakin baik proses pencairan dana, maka akan semakin baik penyerapan anggaran. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Faktor Aturan/Regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan pekerjaannya secara terorganisir dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan keuangan dan perolehan barang dan jasa. Dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 3 Tahun 2011, LKPP mendefinisikan kompetensi kerja sebagai kemampuan setiap pegawai untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan kriteria yang ditentukan. *De Angelo (1981)* mengaitkan pengetahuan dan pengalaman dua faktor dengan kompetensi. Seberapa terdidik dan terlatih seseorang dalam pekerjaannya berfungsi sebagai ukuran pengetahuannya. Dengan dimasukkannya pelatihan formal, pengetahuan akan meningkat (*Bonner dan Walker 1994*). Menurut (*Nanik, 2016*) Seseorang yang melakukan tugas dengan keahlian yang akan memberikan hasil yang memuaskan dari pada individu yang tidak memiliki informasi yang memuaskan tentang kewajiban. Faktor kurangnya Pengetahuan dapat mengakibatkan penundaan pekerjaan, pemborosan material, pemborosan waktu, dan pemborosan energi. Menurut (*Biduri et al., 2020*) Kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penegasan berikut dapat dibuat berdasarkan deskripsi yang diberikan: Sumber daya manusia adalah salah satu penentu utama seberapa baik pemerintah dioperasikan. Hal ini dapat diamati dalam cara orang sebagai karyawan memanfaatkan kemampuan fisik dan psikologis mereka untuk memajukan tujuan *institutional (agent)*. Sedangkan menurut, Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*OutComes*). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3: Nilai Etis Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Pengaruh Faktor Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

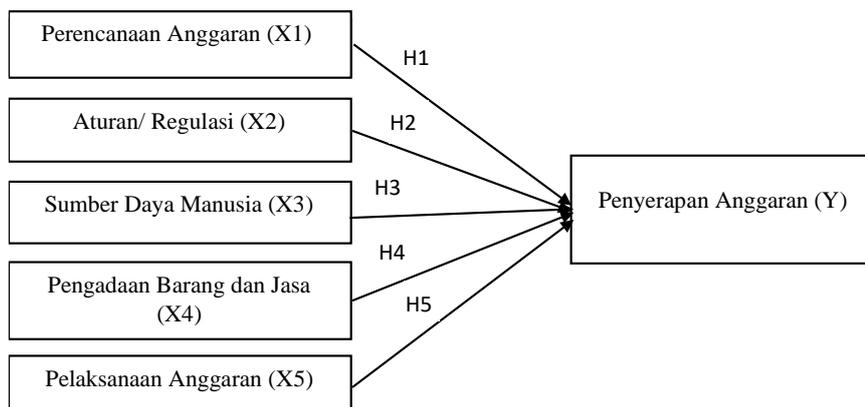
Lebih dari 30 hingga 40 persen anggaran dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa (*Indonesia Procurement Watch*, 2011). Bagian yang signifikan ini dihasilkan dari fakta bahwa pembelian barang dan jasa merupakan fungsi pemerintah dengan implikasi ekonomi yang luas. Karena tidak semua dana yang dialokasikan dapat digunakan, akan ada uang menganggur, yang akan mengakibatkan hilangnya keuntungan belanja jika penyerapan anggaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah (*agent*) tidak tepat sasaran. Konsekuensi dari keterlambatan ini akan menyebabkan tertundanya keuntungan yang akan diperoleh dan dinikmati oleh masyarakat sebagai wali (*principal*). Hal ini terkait dengan pembangunan fisik (amenitas dan infrastruktur) untuk fasilitas umum. Penyerapan anggaran dapat dijadikan sebagai indikator kinerja dalam organisasi pemerintahan. Menurut penelitian dan Menurut studi, proses pembelian barang dan jasa memiliki dampak yang cukup besar terhadap penyerapan anggaran. Konsekuensinya, penyerapan anggaran akan sangat dipengaruhi oleh proses perolehan produk sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Penegasan berikut dapat dibuat sehubungan dengan deskripsi yang diberikan:

H4: Faktor Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Faktor Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Setelah tahap perencanaan anggaran selesai, pengelolaan keuangan harus berlanjut ke tahap pelaksanaan anggaran. Implementasi adalah kegiatan usaha yang digunakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan oleh BPKP. Seiring dengan kesulitan internal unit kerja, prosedur pembayaran anggaran merupakan bagian dari proses pelaksanaan anggaran. Kedua hal ini berdampak pada seberapa banyak uang yang dikonsumsi. Penelitian menunjukkan bagaimana implementasi anggaran berdampak pada bagaimana anggaran itu dibelanjakan. Penyerapan anggaran akan dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran. Menurut *teori agency*, semakin efektif anggaran diimplementasikan, semakin efektif anggaran itu digunakan. Hal ini akan mempengaruhi Satuan Kerja Perangkat Daerah (*agent*) menjalankan ya sejalan dengan tujuan organisasi dan seperti yang diinginkan masyarakat (*principal*). Menurut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pelaksanaan anggaran. Dasar-dasar teoretis dan bukti empiris yang disebutkan di atas memungkinkan hipotesis berikut untuk diajukan:

H5: Faktor Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan anggaran terhadap Pengelolaan Anggaran Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah informasi yang bisa dihitung sehingga diungkapkan dalam bentuk angka atau bilangan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Data primer dari penelitian ini adalah di dapat dari pembagian kuisisioner dengan mendistribusikan melalui g-form.

Pengukuran kuisisioner dengan menggunakan skala ordinal atau sering disebut *skala Likert* [10] yaitu skala preferensi lima tingkat dengan pilihan jawaban sebagai berikut: Skala meliputi Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Skala 5 (lima), Sangat Setuju (SS), Skala 4 (empat), Tidak Setuju (TS), Skala 3 (tiga), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur berjumlah 17 yang terdapat 5 (lima) Bidang, 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jalan dan Jembatan (PJJ) Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik sampling Jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi

digunakan sebagai sampe. Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 68 orang. Adapun pemilihan sampel pada penelitian ini adalah:

Tabel 2. Kreteria dan Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jalan dan Jembatan (PJJ)	12
2. Bidang Pelaksana Jalan dan Jembatan	5
Total UPT dan Bidang	17
Kriteria responden (Pengelola Keuangan) :	4
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),	
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),	
c. Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP),	
d. Pejabat Pengadaan (PP)	
Total sampel	68

Tabel 3. Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sumber Refrensi
Penyerapan Anggaran (Y)	1. Realisasi Anggaran	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
	2. Konsistensi pelaksanaan program/ kegiatan	NOMOR KEP-199/PB/2010
	3. Ketepatan jadwal penarikan anggaran	
Perencanaan Anggaran (X2)	1. Prosedur Anggaran	
	2. Waktu Penetapan Anggaran	Mahsun, Mohamad. 2006
	3. Kesesuaian dengan kebutuhan organisasi	
	4. Revisi DPA	
Aturan/Regulasi (X2)	1. Peraturan	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022
	2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	
Sumber Daya Manusia (X3)	1. Pengetahuan terhadap peraturan	
	2. Pemahaman terhadap tata cara kerja, prosedur kerja, proses kerja, kemauan untuk berkembang	Handayani 2022
	3. Keahlian/ Ketrampilan	
	4. Perilaku Pegawai	
	5. Pendidikan	
	6. Jumlah Personel	
	1. Perencanaan	

Pengadaan		
barang dan		Aji Surya Atma Negara,
Jasa	2. Persiapan Pengadaan	2017
(X4)	3. Prosedur	
Pelaksanaan	1. Proses melalui swakelola atau pemilihan	
Anggaran	penyedia (LS)	
(X5)	2. Pelaksanaan kontrak dan serah terima	
	barang/jasa	BPKP (2011)
	3. Kondisi di lapangan	
	4. <i>Force Majeure</i>	
	5. Waktu Pelaksanaan	
	6. Mekanisme Anggaran	

Teknik analisis yang di gunakan yaitu analisis Regresi Linier Berganda sebuah model regresi yang cakupannya beberapa variabel bebas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendeteksi arah dan respon variabel independen terhadap variabel dependen [21], Tahapan selanjutnya setelah penjabaran variabel yaitu melakukan identifikasi persamaan pengujian. Persamaan yang terbentuk berdasarkan identifikasi variabel adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \beta_5.X_5 + e$$

Dimana:

<i>Y</i>	=	<i>Penyerapan Anggaran</i>
<i>α</i>	=	<i>Konstanta</i>
<i>β</i>	=	<i>Koefisien regresi</i>
<i>X1</i>	=	<i>Perencanaan anggaran</i>
<i>X2</i>	=	<i>Aturan/ regulasi</i>
<i>X3</i>	=	<i>Sumber daya manusia</i>
<i>X4</i>	=	<i>pengadaan barang dan jasa</i>
<i>X5</i>	=	<i>Pelaksanaan anggaran</i>
<i>e</i>	=	<i>Eror</i>

Setelah dilakukan identifikasi menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) sebagai alat analisis data, kemudian data tersebut akan ditabulasikan dan diolah dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda. Pendekatan ini dipilih untuk penelitian ini karena menggunakan beberapa faktor independen dan memungkinkan peneliti untuk lebih mudah menentukan arah dan kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Identifikasi akan digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas semua pertanyaan yang dimasukkan dalam kuesioner yang disebar sebelum dilakukan uji pengaruh.

Kuis yang telah memenuhi uji validitas dan reabilitas selanjutnya dilakukan uji pengaruh yaitu uji t dan uji koefisien determinasi (R^2). Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Apabila thitung lebih besar dari ttabel maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. Selain itu, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna. pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. Sedangkan uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antar variabel yang diteliti. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1 maka semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap Dinas Pekerjaan Umum Bina marga Provinsi Jawa Timur dengan jumlah responden sebanyak 68 Responden yang masing-masing diambil 4 (empat) responden dari setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Bidang. Adapun karakteristik responden yang diolah sebagai berikut:

Tabel 4. Karakteristik Responden
Sumber : Olah Data Primer 2023

Kriteria	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Frekuensi	Presentase
Bidang/ UPT			Usia		
B. Sekretariat	4	5,9	>52 Thn	9	13,2
B. Turdal	4	5,9	<25 Thn - 52 Thn	59	86,8
B. Bintek	4	5,9	Jenis Kelamin		
B. Pembangunan	4	5,9	Laki-laki	41	60,3
B. Pemeliharaan	4	5,9	Perempuan	27	39,7
UPT. PJJ	4	5,9	Jabatan		
Surabaya					
UPT. PJJ	4	5,9	PPTK	17	25,0
Pamekasan					
UPT. PJJ	4	5,9	BP/BPP	17	25,0
Banyuwangi					
UPT. PJJ Jember	4	5,9	PPKOM	17	25,0
UPT PJJ	4	5,9	PP	17	25,0
Probolinggo					

			Lama Jabatan		
UPT. PJJ Malang	4	5,9			
UPT PJJ Mojokerto	4	5,9	<1	14	20,6
UPT PJJ Kediri	4	5,9	>2	33	48,5
UPT PJJ Madiun	4	5,9	1-2 THN	21	30,9
UPT PJJ Bojonegoro	4	5,9			
			PEND_TERAKHIR		
UPT PJJ Pacitan	4	5,9	S1	49	72,1
UPT Laboratorium	4	5,9	S2/S3	14	20,6
			D1/2/3	5	7,4

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa responden pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang dalam pelaksanaannya terdapat 5 (lima) Bidang, 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jalan dan Jembatan (PJJ) yang masing-masing presentase 5,9 % atau sebanyak 4 responden, usia >52 Th prosentase 13,2% sebanyak 9 orang sedangkan <25 Th–52 Th prosentase 86,8% sebanyak 59 orang. Jenis kelamin laki-laki presentase 60,3% perempuan 39,7%. Masing-masing dalam pelaksanaan memiliki tugas sebagai pengelola keuangan dengan presentase 25,0%, yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran (BP)/ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pejabat Pengadaan (PP). Lama jabatan <1Th presentase 20,6% sebanyak 14 orang, >2 Thn presentase 48,5% sebanyak 33 orang, sedangkan 1-2 Th Presentase 30,9% sebanyak 21 orang. Pendidikan terakhir S1 Presentase 72,1% sebanyak 49 orang, pendidikan S2/S3 presentase 20,6% sebanyak 14 orang, sedangkan Pendidikan D1/2/3 presentase 7,4% sebanyak 5 orang.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif jawaban responden dirancang agar peneliti dapat memahami kecenderungan tanggapan responden terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah hasil analisis deskriptif untuk masing-masing variabel:

Tabel 5. Analisis Deskriptif

Sumber: Data Oalahan SPSS Versi 26.2023

	N	TOT_X1	TOT_X2	TOT_X3	TOT_X4	TOT_X5	TOT_Y1
Mean	68	19,65	10,84	24,38	17,59	28,13	23,71
Std. Deviation	68	4,033	2,789	4,357	3,297	3,808	4,655
Minimum	68	10	6	13	8	12	12
Maximum	68	29	20	33	31	36	32
Valid N(Listwise)	68						

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Tabel 5.1 Hasil Uji Validasi Perencanaan Anggaran (X1)

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 26.2023

Pertanyaan	Person Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
X1.1	.597**	0,235	Valid
X1.2	.696**	0,235	Valid
X1.3	.630**	0,235	Valid
X1.4	.599**	0,235	Valid
X1.5	.692**	0,235	Valid
X1.6	.481**	0,235	Valid
X1.7	0,157	0,235	Tidak Valid
X1.8	.779**	0,235	Valid
X1.9	.702**	0,235	Valid
X1.10	.716**	0,235	Valid

Berdasarkan Pengujian Validitas, item kuisioner yang dipakai untuk mengukur variabel Perencanaan Anggaran dikatakan valid karena mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel. Berdasarkan nilai koefisien korelasi pada kolom r hitung dan r tabel diatas, terdapat 1 (satu) item pernyataan (X1.7) tidak valid, karena nilai koefisien kurang dari 0,235.

Tabel 5.2 Hasil Uji Validasi Aturan /Regulasi (X2)

Pertanyaan	Person Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
X2.1	.754**	0,235	Valid
X2.2	.760**	0,235	Valid
X2.3	.840**	0,235	Valid
X2.4	.541**	0,235	Valid
X2.5	.595**	0,235	Valid
X2.6	.688**	0,235	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 26.2023

Berdasarkan tabel tersebut, semua item kuisioner yang dipakai untuk mengukur variabel Aturan dan Regulasi (X2) dikatakan valid karena mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel.

Tabel 5.3 Hasil Uji Validasi Sumber Daya Manusia (X3)

Sumber: Data Oalahan SPSS Versi 26.2023

Pertanyaan	Person Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
X3.1	.572**	0,235	Valid
X3.2	.727**	0,235	Valid
X3.3	.517**	0,235	Valid
X3.4	.637**	0,235	Valid
X3.5	.758**	0,235	Valid
X3.6	.686**	0,235	Valid
X3.7	.595**	0,235	Valid
X3.8	.418**	0,235	Valid
X3.9	.688**	0,235	Valid
X3.10	.662**	0,235	Valid
X3.11	.642**	0,235	Valid
X3.12	.745**	0,235	Valid
X3.13	.599**	0,235	Valid

Semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Sumber Daya Manusia (X3) adalah valid karena memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel.

Tabel 5.4 Hasil Uji Validasi Pengadaan Barang dan Jasa (X4)

Sumber: Data Oalahan SPSS Versi 26.2023

Pertanyaan	Person Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
X4.1	.652**	0,235	Valid
X4.2	.702**	0,235	Valid
X4.3	.445**	0,235	Valid
X4.4	.701**	0,235	Valid
X4.5	.616**	0,235	Valid
X4.6	.613**	0,235	Valid
X4.7	.735**	0,235	Valid
X4.8	.344**	0,235	Valid

Semua item kuisisioner yang dipakai untuk mengukur variabel Pengadaan Barang dan Jasa dikatakan valid karena mempunyai nilai *pearson correlation* yang lebih besar dari nilai r tabel.

Tabel 5.5 Hasil Uji Validasi Pelaksanaan Anggaran (X5)

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 26.2023

Pertanyaan	Person Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
X5.1	.384**	0,235	Valid
X5.2	0,230	0,235	Tidak Valid
X5.3	.303*	0,235	Valid
X5.4	.655**	0,235	Valid
X5.5	.449**	0,235	Valid
X5.6	.403**	0,235	Valid
X5.7	.480**	0,235	Valid
X5.8	.451**	0,235	Valid
X5.9	.257*	0,235	Valid
X5.10	.632**	0,235	Valid
X5.11	.481**	0,235	Valid
X5.12	.469**	0,235	Valid

Berdasarkan nilai koefisien korelasi pada kolom r hitung dan r tabel diatas, uji validasi Pelaksanaan Anggaran terdapat 1 (satu) item pernyataan (X5.2) tidak valid, karena nilai koefisien kurang dari 0,235.

Tabel 5.6 Hasil Uji Validasi Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 26.2023

Pertanyaan	Person Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Y1.1	.647**	0,235	Valid
Y1.2	.650**	0,235	Valid
Y1.3	.485**	0,235	Valid
Y1.4	.564**	0,235	Valid
Y1.5	.679**	0,235	Valid
Y1.6	.552**	0,235	Valid
Y1.7	.587**	0,235	Valid
Y1.8	.661**	0,235	Valid
Y1.9	.678**	0,235	Valid
Y1.10	.526**	0,235	Valid
Y1.11	.680**	0,235	Valid
Y1.12	.561**	0,235	Valid

Pengujian Validitas diatas pada Variabel penyerapan Anggaran (Y) nilai koefisien korelasi pada kolom r hitung dan r tabel diatas dikatakan valid karena mempunyai nilai *pearson correlation* yang lebih besar dari nilai r tabel (0.235).

Uji Reliability (Uji Reliabilitas)

Tabel 5.7 Hasil Uji Reliabel Data
Sumber: Data Olahan SPSS Versi 26.2023

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	0,831	Reliabel
Aturan/ Regulasi (X2)	0,798	Reliabel
Sumber Daya Manusia (X3)	0,795	Reliabel
Pengadaan Barang dan Jasa (X4)	0,871	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran (X5)	0,729	Reliabel
Penyerapan Anggaran (X6)	0,617	Reliabel

Berdasarkan tabel 5.7 hasil uji reabilitas tersebut, item-item pernyataan atas instrumen tiap variabel dikatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Menurut [24] kuisioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5.8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Sumber : Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,419	2,820		0,503	0,617
Perencanaan Anggaran (X1)	0,661	0,153	0,573	4,312	0,000
Aturan/ Regulasi (X2)	0,248	0,223	0,148	1,110	0,271
Sumber Daya Manusia (X3)	0,215	0,105	0,201	2,057	0,044
Pengadaan Barang dan Jasa (X4)	-0,370	0,176	-0,262	-2,105	0,039

Pelaksanaan Anggaran (X5)	0,280	0,138	0,229	2,035	0,046
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

a. Dependent Variabel: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel *Coefficients* diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,419 - 0,661X1 + 0,248X2 + 0,215X3 - 0,370X4 + 0,280X5 + \epsilon$$

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Sumber : Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.801 ^a	0,641	0,612	2,899

a. Predictors: (Constant),Pelaksanaan Anggaran, Aturan/ Regulasi, Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran
b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi, didapatkan nilai *R square* sebesar 0.641 yang berarti bahwa pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 64,1%. Dapat diartikan bahwa variabel Pelaksanaan Anggaran, Aturan/ Regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan Anggaran berpengaruh sebesar 64,1% terhadap Penyerapan Anggaran. Sedangkan sisanya 35,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil Uji t (uji parsial)

Tabel 5.10. Hasil Uji t

Sumber : Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1,419	2,820			0,503	0,617
Perencanaan Anggaran (X1)	0,661	0,153	0,573		4,312	0,000
Aturan/ Regulasi (X2)	0,248	0,223	0,148		1,110	0,271

Sumber Daya Manusia (X3)	0,215	0,105	0,201	2,057	0,044
Pengadaan Barang dan Jasa (X4)	-0,370	0,176	-0,262	-2,105	0,039
Pelaksanaan Anggaran (X5)	0,280	0,138	0,229	2,035	0,046

a. Dependent Variabel: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel hasil uji t di atas terlihat bahwa t hitung perencanaan anggaran (X1) adalah 4,312 dan t tabel adalah 1.995 sehingga t hitung > t tabel serta signifikansi variabel Perencanaan Anggaran adalah 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, H1 diterima maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perencanaan Anggaran (X1) secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Nilai t hitung variabel aturan/regulasi adalah 1,110 sedangkan t tabel adalah 1.995 sehingga t hitung < t tabel dengan signifikansi pada variabel Aturan/Regulasi adalah 0.271 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Sehingga H2 ditolak dan dapat diambil kesimpulan bahwa aturan/ regulasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Nilai t hitung untuk variabel sumber daya manusia adalah 2,057 dan t tabel sebesar 1.995 sehingga t hitung > t tabel. Untuk variabel sumber daya manusia tingkat signifikansinya adalah 0.044 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Dengan begitu H3 diterima dan dapat dijelaskan bahwa variabel sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Dari tabel hasil uji t, nilai t hitung variabel pengadaan barang dan jasa adalah 2,105 dan t tabel adalah 1.995 sehingga t hitung > t tabel dengan tingkat signifikansi pada variabel pengadaan barang dan jasa adalah 0.039 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Oleh sebab itu, H4 diterima maka dapat dijelaskan bahwa variabel pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Nilai t hitung untuk variabel pelaksanaan anggaran adalah 2,035 dan t tabel sebesar 1.995 sehingga t hitung > t tabel. Untuk variabel sumber daya manusia tingkat signifikansinya adalah 0.046 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Dengan begitu H5 diterima dan dapat dijelaskan bahwa variabel pelaksanaan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Hasil uji yang telah dilakukan, diketahui bahwa Penganggaran berdampak pada penyerapan dana menunjukkan bahwa Semakin baik kegiatan dan perencanaan terkait anggaran, semakin baik besar penyerapan anggarannya; sebaliknya, jika kegiatan dan perencanaan anggaran semakin buruk, maka penyerapan anggaran akan melambat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ahyaruddin, 2022) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Talaud; dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Untuk mencapai keberhasilan organisasi, *principal* dan *steward* memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan organisasi, sesuai dengan kerangka *teori stewardship*. Masyarakat atau wali amanat (*principal*) memiliki kuasa untuk meminta agar dinas PUPR atau pengurus mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, prinsipal wajib melaporkan perencanaan program yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa penyusunan harus terlihat dampaknya terhadap retensi rencana keuangan melalui modifikasi DPA, dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas. Memastikan adanya keterkaitan dan konsistensi antara menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa setiap rencana kerja, yang membentuk alasan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan rencana untuk mencapai hasil kinerja setiap tujuan. Proses penyusunan tindakan dalam perencanaan merupakan siklus utama. Proses perencanaan anggaran telah berlangsung sejak awal tahun anggaran. Setiap wilayah atau UPT di lingkungan Administrasi Pekerjaan Umum Bina Marga wilayah Jawa Timur harus membuat kerangka acuan yang berfungsi bersama dengan pengaturan keuangan.

Pengaruh Aturan/ Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Hipotesis kedua menyatakan regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, pada Tabel 5.2 t hitung 1,110 sedangkan t tabel adalah 1.995 sehingga t hitung $<$ t tabel dengan signifikansi pada variabel Aturan/Regulasi adalah 0.271 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Sehingga H_2 ditolak dan dapat diambil kesimpulan bahwa aturan/ regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran sehingga menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu tanda hasil penelitian adalah negative.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian hasil kajian ini mempertanyakan praduga logis bahwa aturan/ regulasi seharusnya akan memudahkan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerja, dan semakin cepat penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan tersebut, yang tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan visi, misi organisasi Menurut *stewardship theory*, jika peraturan dikeluarkan dengan jelas maka pelaksanaan pekerjaan akan memudahkan pegawai (*steward*) dalam menjalankan program dan kegiatan di unit kerja, sehingga diharapkan akan dilakukan penyerapan anggaran. lebih cepat. Namun jika regulasi sering berubah, hal ini akan membuat pegawai (*Steward*) resah dalam menjalankan program kerja yang diinginkan masyarakat (*principal*). Jika dilihat dari hasil uji yang berarti bahwa satuan kerja minim mengalami permasalahan tentang regulasi, dimana regulasi dirasa cukup jelas sehingga memudahkan didalam pelaksanaannya.

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Hasil uji yang ketiga H3 dalam penelitian ini diketahui bahwa sumber daya manusia berdampak pada penyerapan anggaran, menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki maka akan mempermudah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebuah organisasi akan mendapat manfaat besar dari memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, serta membangun reputasi positif yang menumbuhkan kepercayaan sosial. Hal ini sejalan dengan teori stewardship dimana dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai steward yang mengelola sumber daya masyarakat (*principal*). Semakin mahir SDM Dinas PUPR (*Steward*) dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat (*Principal*), semakin baik penggunaan anggaran karena sumber daya tersebut sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya. Hasil ini konsisten dengan Seseorang yang menyelesaikan tugas dengan keahlian yang diperlukan, akan memberikan hasil yang unggul. Kurangnya informasi merupakan masalah yang dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan, pemborosan material, serta kerugian waktu dan energi. Hal ini terkait pada karakter responden pada penelitian usia, lama jabatan, tingkat pendidikan, sangat berpengaruh terhadap proses penyerapan anggaran.

Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, artinya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai jadwal rencana akan sangat mempengaruhi penyerapan anggaran. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Berdasarkan *teori Agency* Karena tidak semua dana yang telah dialokasikan dapat digunakan, akan ada uang menganggur, yang akan mengakibatkan hilangnya keuntungan belanja jika tujuan penyerapan anggaran yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dilakukan oleh Pemerintah (*agent*). tidak terpenuhi. Masyarakat sebagai wali (*principal*) mungkin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan dan menikmati keuntungan jika berkaitan dengan pembangunan fisik (amenitas dan infrastruktur) fasilitas umum. Penyerapan anggaran dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja pada entitas pemerintahan.

Proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sudah memanfaatkan system pengadaan dan hasil dari proses pengadaan disampaikan secara transparan dan terbuka dengan menggunakan program LPSE meliputi rancangan umum baik pengadaan barang maupun jasa, proses pra pemilihan, dan proses dalam pelaksanaannya LPSE mengundang OPD.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, artinya menunjukkan jika pelaksanaan anggaran semakin baik, maka semakin baik pula penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran akan

dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran. Menurut teori keagenan, anggaran akan semakin efektif digunakan semakin baik diimplementasikan. Hal ini akan mempersulit Satuan Kerja Perangkat Daerah (*agent*) untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang memajukan baik tujuan organisasi maupun tujuan masyarakat (*principa*). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian [21]; [25]; [28] bahwasannya pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran baik secara simultan maupun parsial

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Perencanaan anggaran, aturan/regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor perencanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan faktor aturan/regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dalam penyerapan anggaran Proses perencanaan kegiatan dalam penganggaran merupakan proses yang paling utama. Perencanaan yang baik maka hasil penyerapan anggaran juga semakin baik. Begitu pula dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi manfaat yang jelas bagi suatu organisasi dan pembentuk citra yang kuat sehingga masyarakat mengembangkan rasa percaya dan proses penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik. Aturan/ regulasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dirasa aturan yang ada sudah cukup jelas dan prosedur yang ada sudah sesuai aturan/ regulasi. Sedangkan proses pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sudah efisiensi dan efektif dan hasil dari proses pengadaan disampaikan secara transparan dan terbuka. Disarankan untuk menggunakan ukuran sampel yang lebih besar dalam penelitian selanjutnya untuk meningkatkan ketepatan data yang digunakan. Diperkirakan bahwa akan ada faktor-faktor lain yang mungkin berdampak pada berbagai aspek penelitian ini. Dengan melakukan penelitian berkelanjutan, dimungkinkan untuk memantau dan mengevaluasi setiap perubahan perilaku responden saat terjadi.

Daftar Pustaka

- Ani, L., Mulyadi, J., & Pratowo, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja dengan perencanaan anggaran sebagai pemoderasi pada Pemerintah Kota Depok tahun 2013-2017. *Jurnal Ekobisman*, 5(1), 1-16.
- Ajani, D., Hermawan, S., & Biduri, S. (2020). Determinasi audit report lag. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 76-97. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.4112>
- Binamarga. (n.d.). Retrieved from <https://binamarga.jatimprov.go.id/portal/phocadownload/LAKIP/LKJ-2021-FINAL.pdf>
- BPKP. (2011). Menyoal penyerapan anggaran. *Paris Review*, 1-56. Retrieved from http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/PARIS_REV_NEW/PR_Ed_6kcl.pdf
- Department of Public Works and Spatial Planning, Government of East Java Province. (2017). Rencana kerja (RENJA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (No. 167).

- Devil, I. W. (2013). Pengujian hipotesis: Regresi linier berganda, uji t, uji f dan uji R square (penjelasan lengkap). IMAN "WHITE DEVIL" BLOG.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & David, T. E. (2018). Perangkat daerah di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 46-56.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1).
- Ghozali, I. (2015). Konsep, teknik, aplikasi menggunakan Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris. BP Undip. SemarangHarnanto. *Akuntansi Biaya Sist. Biaya Hist. Yogyakarta BPFE*.
- Hadiyati, N. (2018). Tinjauan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa elektronik. *Jurnal Pengadaan - LKPP RI*, 1(2), 1-9. Retrieved from www.lkpp.go.id
- Hasni, N. T., & Basukianto, B. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmiah Telaah Manajemen*, 13(1).
- James. (n.d.). Retrieved from <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/10067/accounting-information-systems-sistem-informasi-akuntansi-buku-1-4-e-.html>
- Kuswoyo. (2011). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan terkonsentrasinya penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran (Studi pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri). (Master's thesis). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Masmarullan, & Isiswati. (2020). Perencanaan anggaran sebagai pelaksanaan terhadap akuntabilitas dalam pelayanan publik. *Perencanaan Anggaran Sebagai Pelaksanaan Terhadap Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik*, IV, 157-165.
- Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (2021). Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga [PMK 22/PMK.02/2021]. Retrieved from www.jdih.kemenkeu.go.id
- Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved from <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Nugrahawati, Z. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 di SKPD Kabupaten Tuban (Studi pada SKPD Badan Lingkungan Hidup). *Publika*, 4(10), 1-11.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 81-90. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918>
- Perpu. (n.d.). Retrieved from <https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/arsip/info/41627.html>
- Raharjo, S. (2017). Cara melakukan uji t parsial dalam analisis regresi dengan SPSS. SPSS Indonesia.
- Rahmawati, R., & Ishak, J. F. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180-189.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710-726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>

- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134-148. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah: Proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Aud*
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati, R. S. M. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan daya serap anggaran (Studi empiris pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 1-10. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p01>
- Safpremi, Y., Putri, A. M., & Ahyaruddin, M. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 188. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i2.5386>
- Sugiyono. (n.d.). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Retrieved from <https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpkk/>
- Suwarni. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Surabaya (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematuan). *Publika*, 6(5), 1-7.
- Syahwildan, M., & I. D. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 169-176.
- Tofani, M. I., Hasan, A., & Nasrizal. (2020). Analysis of the factors that affect the budget absorption in the Riau and. *Bilancia Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 165-182.
- Yunita, N., & Putra, I. S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja daerah guna optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Dinas PORBUDPAR Kota Blitar. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi*, 3(1), 95-108. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.337>